



Anggota Komisi D DPRD Jogja H Setyaji Hermawan

## Wujudkan Keadilan Sosial, Kawal Jaminan Kesehatan Tepat Sasaran

Keadilan sosial dalam bidang kesehatan menjadi salah satu perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja H Setyaji Hermawan. Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pun akan memastikan untuk terus mengawal jaminan kesehatan yang merata.



**CAPAIAN** Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Jogja yang mencapai 100 persen patut dibanggakan. Namun capaian tersebut harus dipastikan berjalan efektif dan berkeadilan. Terutama bagi masyarakat miskin.

Aji memastikan akan mengawal hak dasar masyarakat tersebut. Termasuk memperkuat kemitraan dengan dinas kesehatan dan dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang bersinggungan langsung dengan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.

"Kami berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi yang berkaitan langsung dengan program JKN bagi segmen penerima bantuan iuran (PBI), karena iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah," ujar Aji kepada *Radar Jogja* Kamis (23/10). Dia mengaku, akan fokus memastikan data PBI akurat dan



**HARUS MERATA:** Capaian Universal Health Coverage (UHC) di Kota Jogja sudah mencapai 100 persen. Namun capaian tersebut harus dipastikan berjalan efektif dan berkeadilan. Terutama bagi masyarakat miskin.

kepesertaannya dalam JKN tetap aktif. Sehingga harapannya, tidak lagi kasus masyarakat miskin yang ditolak di puskesmas atau rumah sakit ketika ingin mengakses pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, Aji pun akan terus mengawal alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membayar iuran PBI. Alokasinya harus terus optimal meskipun di tengah efisiensi anggaran. Sehingga jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu tetap terpenuhi tanpa hambatan.

Bagi Setyaji, jaminan kesehatan merupakan manifestasi dari keadilan sosial dan hak asasi manusia. Sekaligus menjadi tameng finansial bagi masyarakat miskin ketika sakit.

"Di kota yang sudah mencapai UHC seperti Jogja, setiap warga negara wajib mendapatkan haknya untuk sehat tanpa perlu khawatir akan biaya," tegasnya. Selain dari sisi administratif, dewan yang berangkat dari Dapil II Kota Jogja ini juga akan mengawasi kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan JKN. Agar puskesmas maupun rumah sakit memberikan pelayanan yang setara dan bermutu. Terlepas dari status pasien dengan kepesertaan JKN/KIS. (\*/inu/eno/by)

Di kota yang sudah mencapai UHC seperti Jogja, setiap warga negara wajib mendapatkan haknya untuk sehat tanpa perlu khawatir akan biaya,"

H Setyaji Hermawan  
Anggota Komisi D DPRD Jogja

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005